

BAB IV

AKTIVITAS SOSIAL KEAGAMAAN NU DI MEDAN

A. Aktivitas Keagamaan NU di Medan

Tujuan dasar berdirinya NU adalah untuk menyebarkan ajaran Islam berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan untuk mencapai kemaslahatan, kesejahteraan umat dan terciptanya rahmat bagi semesta. NU sebagai organisasi sosial-keagamaan memperhatikan dua aspek paling penting dalam masyarakat yakni kehidupan sosial dan agama.

Untuk itu, NU melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah. Sesuai dengan program pokoknya, dalam AD/ART NU,¹ fungsi pelaksana kebijakan NU di bidang keagamaan dipegang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU), Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), Jam'iyah Ahli Tariqah al-Mu'tabarah dan Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH).

Di lingkungan NU wilayah Sumatera Utara, hanya satu dari lima lembaga dan badan otonom di atas yang telah terbentuk hingga akhir tahun 2010, yakni Lembaga Dakwah NU. Sedangkan sisanya baru akan dibentuk dan disahkan kepengurusannya pada tanggal 2 Maret 2011. Dengan demikian, hampir seluruh aktivitas keagamaan NU hanya dilaksanakan oleh LDNU.²

Terkait dengan perkembangan aktivitas dakwah yang tentu berhubungan erat dengan se 86 DNU, informasi tentangnya sangat

¹Sekretariat Jendral PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah Nahdlatul Ulama* (Medan: PWNNU Sumatera Utara, 2010), h. 11.

²Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Pebruari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

sulit didapatkan mengingat kurangnya tokoh NU yang mengetahui informasi tentang perkembangan LDNU.

Tujuan aktivitas keagamaan LDNU pada dasarnya penyebaran syiar Islam di kalangan masyarakat Muslim. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh LDNU dalam bidang keagamaan, yakni:

1. Peringatan Hari Besar Islam

Memperingati Hari Besar Islam merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan NU setiap tahun, seperti peringatan Isra' Mi'raj dan peringatan Maulid Nabi. Tempat peringatan hari besar Islam dilaksanakan oleh koordinator LDNU atau koordinator bidang dakwah di berbagai tempat baik di mesjid-mesjid maupun di kantor PWNU.³

Pada tahun 2010, PWNU Sumatera Utara memperingati hari Isra' Mi'raj di Kantor PWNU Sumatera Utara di Jl. Sei Batang Hari. Dalam acara tersebut diadakan ceramah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Pagar Hasibuan.

2. Pesantren Kilat

Pada bulan Ramadhan, biasanya LDNU mengadakan Pesantren Kilat di sekolah-sekolah maupun di mesjid-mesjid. Aktivitas di pesantren kilat yang dikoordinator NU pada umumnya terdiri dari pendidikan agama Islam berupa pengajaran ibadah, seperti menghafal bacaan-bacaan salat, surat-surat pendek atau tata cara berwudhu', hadis-hadis pendek dalam bidang amal kebajikan. Anak-anak yang mengikuti pesantren kilat terdiri dari siswa-siswa SD dan SMP. Di samping koordinator, LDNU juga berfungsi sebagai nara sumber atau guru atau pembimbing dalam pesantren kilat.⁴

³Pagar Hasibuan, Ketua Syuriah PWNU Sumatera Utara, wawancara pada 23 November 2010 di PPS IAIN SU.

⁴Maraimbang, pengurus PCNU kota Medan, wawancara pada 10 November 2011 di IAIN SU.

3. Pelatihan Da'i se-Sumatera Utara

Salah satu aktivitas yang paling penting, meskipun tidak terprogram secara berkala adalah pelatihan dakwah bagi da'i se-Sumatera Utara. pelatihan dakwah bagi dai'i tersebut pernah dilaksanakan pada tahun 2008 yang diikuti oleh dai-dai dari kalangan pesantren se-Sumatera Utara. Meskipun penting dan seharusnya menjadi program utama LDNU, dari tahun 2009 hingga 2011, program ini belum pernah dilaksanakan kembali.

4. Ceramah

Aktivitas lainnya adalah mengadakan ceramah singkat di mesjid-mesjid warga NU. Dalam hal ini, biasanya LDNU meminta kesediaan tokoh-tokoh NU dalam bidang keagamaan untuk menjadi penceramah.

5. Sahur Bersama

Pada Agustus 2010, GP Ansor mengadakan sahur bersama anak jalanan dan kaum du'afa Pulo Brayan, Masjid Raya Medan, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Jalan Sisingamangaraja, Jalan Juanda dan kawasan Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto.

6. Harlah

Pada 31 Januari 2011, NU melaksanakan Harlah NU ke 85 di kantor PWNU di Jl. Sei Batanghari. Pada tahun sebelumnya, 31 Januari 2010 diadakan di Istana Maimun. Harlah merupakan peringatan hari jadi NU. Dalam acara ini seluruh komponen NU baik pengurus dan masyarakat NU menghadiri acara harlah.

7. Halal bil Halal atau Silaturahmi

Hampir setiap tahun, PWNU melaksanakan Halal Bil Halal maupun silaturahmi bersama warga NU. Pada tahun 2009, PWNU melakukan Halal Bil Halal di kantor PWNU di Jl. Palang Merah. Pada tahun 2007, PWNU juga melakukan silaturahmi bersama warga NU di tempat yang sama.

Selain aktivitas tersebut, NU di Medan juga pernah melaksanakan Dzikir Akbar dan Muzakarah, menyembelih hewan qurban serta kegiatan untuk menyemarakkan bulan Ramadhan.⁵ Salah satu aktivitas baru yang membanggakan adalah terbitnya edisi perdana *Warta Nahdlatul Ulama* di Sumatera Utara pada bulan Maret 2011. Isi berita warta tersebut cukup bervariasi dan merupakan bentuk dakwah NU di Medan, mulai dari sejarah NU, opini (fikroh), halaqah dan pendidikan.⁶

Besarnya nama NU di tingkat nasional belum disertai dengan peran yang memuaskan dalam bidang agama di Sumatera Utara. Dalam AD/ART disebutkan program-program yang bagus dalam bidang keagamaan yang akan dilaksanakan oleh LDNU, LTMNU, LBMNU, JQH dan Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah. Sayangnya, dalam praktiknya program ini tidak terlaksana dan jauh dari memuaskan. Lebih dari itu, hingga saat ini, dari ketiga lembaga dan dua badan otonom yang disebutkan di atas, baru LDNU yang terbentuk secara defacto dan secara formal. Selainnya masih akan dibentuk dan dilantik pengurusnya pada bulan Maret 2011.

Kurangnya peran NU di Medan dan tidak terencananya aktivitas di bidang keagamaan diakibatkan oleh ketidaktersediaan dana. Lembaga yang melaksanakan fungsi dan tugas NU di bidang keagamaan melakukan kegiatan sewaktu-waktu ketika ada dana yang umumnya merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

B. Aktivitas Pendidikan NU di Medan

Sejarah pergerakan NU di bidang pendidikan telah dimulai sejak masa-masa awal berdirinya organisasi NU. Sejarah perkembangan pendidikan NU pada dasarnya merupakan cikal bakal

⁵Berbagai berita tentang aktivitas keagamaan NU dalam media NU www.nuonline.or.id. Diakses pada 2 Pebruari 2011.

⁶*Warta Nahdlatul Ulama* edisi perdana Maret 2011.

pendidikan nasional khusus dalam pendidikan agama. Melalui lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi, NU menjadi salah satu penggerak pendidikan di Indonesia. Gagasan pendidikan NU telah muncul sejak Muktamar ke-2 NU tahun 1927. Dalam muktamar tersebut, para pesertanya mengagendakan penggalangan dana secara nasional untuk mendirikan dan membangun madrasah dan sekolah.⁷

Pada muktamar kedua, dibentuk Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) yang bertujuan untuk menggerakkan kepedulian terhadap pendidikan. HBNO bertukar nama menjadi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada muktamar ke-20 NU pada 1959. Meskipun tetap menjadikan pendidikan sebagai salah satu sektor perhatian utama, barulah pada Munas NU tahun 2002, NU mempertegas kembali perannya dalam bidang pendidikan. Setelah Munas tahun 2002, diselenggarakan rapat kerja LPMNU dan Musyawarah Kerja Perguruan Tinggi NU untuk mematangkan format, strategi, dan pedoman pengembangan pendidikan di lingkungan NU. Salah satu hasil Raker dalam Munas tahun 2002 adalah dirumuskannya Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (terlampir) dan Pedoman pengelolaan Satuan pendidikan ma'arif nahdlatul ulama (terlampir).⁸ Selanjutnya pada tahun 2006, LPMNU juga merumuskan standar kompetensi pendidikan Ma'arif untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas (terlampir).⁹

LPMNU adalah lembaga yang merupakan perangkat yang melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran. LPMNU secara resmi berdiri

⁷"Ma'arif Model Pendidikan NU" artikel dalam *Republika*, edisi 20 Maret 2010.

⁸LPMNU, Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Dokumen hasil Raker LPMNU tahun 2002.

⁹LPMNU, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Dokumen hasil Raker LPMNU tahun 2002.

pada 7 Februari 1961. Tugas utamanya adalah membina, mendirikan, dan menyelenggarakan sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah dari tingkat pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi serta pendidikan nonformal, seperti kursus-kursus dan pelatihan keterampilan.¹⁰

Sekolah atau madrasah Maarif pada awalnya berdiri atas inisiatif masyarakat. Karena itu penanganannya cukup sederhana. Dalam perkembangannya, dengan adanya LPMNU, sekolah atau madrasah tersebut ditata sedemikian rupa agar berkembang lebih baik.

Tujuan awal pendidikan pada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU adalah penyebaran syiar Islam. Hal ini kemudian menyebabkan kuantitas lembaga pendidikan lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitasnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan pendidikan nasional di Indonesia, berdirinya berbagai lembaga pendidikan, lembaga pendidikan Ma'arif dipaksa untuk mengembangkan pola pendidikan sesuai dengan kecenderungan umum lembaga pendidikan seperti pengembangan potensi pokok bila tidak ingin lembaga tersebut ditinggalkan oleh masyarakat.¹¹

Sebagai akibat dari proses modernisasi, lembaga pendidikan Maarif mengajarkan ilmu-ilmu umum di samping pelajaran materi agama. Banyak dari lembaga ini yang kemudian beralih dan mengganti kurikulum dengan kurikulum pemerintah.

Sayangnya, sejak NU ikut berpartisipasi dalam politik aktif, perhatian terhadap aspek pendidikan berkurang dan lembaga pendidikan Ma'arif menjadi terabaikan. Keikutsertaan NU dalam politik praktis banyak berpengaruh terhadap program-program pokok NU. Bahkan, sejak NU keluar dari politik praktis (kembali ke khittah) perhatian terhadap pendidikan tidak juga membaik.

¹⁰"Ma'arif Model Pendidikan NU"artikel dalam *Republika*,

¹¹*Ibid.*

Seperti yang ditetapkan dalam Munas pada tahun 2002, LPMNU wilayah Sumatera Utara berkeinginan untuk menjadikan lembaga ini sebagai penentu kebijakan pendidikan NU di tingkat wilayah Sumatera Utara dan menjadi organisasi yang solid dalam memberikan pelayanan organisatoris, organisasi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan berbagai pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wilayah Sumatera Utara, menjadikan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang terpercaya dan mampu menjadi perekat masyarakat Nahdliyyin dalam penyelenggaraan pendidikan dan menjadikan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai pengendali dan pelaksana supervisi dalam akuntabilitas penyelenggaraan dan lulusan pendidikan dari setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan.

Misi LPMNU Sumatera Utara adalah:¹²

1. Menyelenggarakan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal.
2. Melakukan standarisasi mutu pendidikan melalui pelayanan supervisi, pengembangan quality control dan akreditasi pendidikan.
3. Memberikan pelayanan konsultasi dan advokasi pendidikan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas di lingkungan Nahdlatul Ulama.
4. Mengkoordinasikan semua penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga, lajnah dan badan otonom Nahdlatul Ulama.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di tingkat Pusat, Cabang, Majelis Wakil Cabang, Perguruan Tinggi NU dan pengelolaan setiap pendidikan (formal, non-formal) yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama.

¹²PWNU Sumatera Utara, *Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Nahdlatul Ulama Sumatera Utara 2007*. Buku tidak diperjualbelikan. Diperbanyak oleh PWNU Sumatera Utara, Medan, 2007, h. 8.

Secara garis besar, tujuan LPMNU Sumatera Utara adalah untuk meningkatkan partisipasi umat Islam dalam melaksanakan tugas pendidikan guna membentuk manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil serta melaksanakan paham Ahlussunnah Waljama'ah dan bertanggung-jawab akan kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPNU Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:¹³

1. Membantu masyarakat dalam usaha melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan di bidang agama di wilayah Sumatera Utara.
2. Membantu masyarakat dalam upaya pemerataan dan pelayanan pendidikan di wilayah Sumatera Utara.
3. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang mengembangkan upaya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah.
4. Sebagai wadah kegiatan dan wahana yang mengembangkan ilmu dan teknologi serta keterampilan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam praktiknya, LPMNU Sumatera Utara tidak terlalu aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam di Medan. Bila dibandingkan dengan Muhammadiyah dan al-Washliyah yang mempunyai berbagai lembaga pendidikan Islam di seluruh jenjang, NU ketinggalan jauh dalam pengembangan pendidikan di Medan. Baik Muhammadiyah dan al-Washliyah mempunyai lembaga pendidikan tinggi UMSU dan UNIVA, sementara NU hingga sekarang tidak lagi mempunyai dan mengelola lembaga pendidikan tinggi.

¹³*Ibid.*

Menurut Ashari Tambunan, kemerosotan lembaga pendidikan NU di Sumatera Utara secara umum, khususnya di Medan, terjadi akibat pengaruh dari kebijakan pendidikan pemerintah di masa pemerintahan Soeharto yang menetapkan bantuan hanya diberikan kepada lembaga pendidikan negeri. Karena itu, berbagai lembaga pendidikan NU berubah dan tidak lagi menggunakan nama NU atau al-Ma'arif seperti Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. IAIN Sumatera Utara sendiri pada awalnya merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam NU yang diambil alih pemerintah.¹⁴

Pengaruh kebijakan pemerintah tersebut terhadap kemerosotan lembaga pendidikan NU di Medan tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, hilangnya berbagai lembaga pendidikan NU di Sumatera Utara, khususnya Medan membuktikan kurangnya SDM NU Sumatera Utara dalam mengelola dana pendidikan dan konsistensi dalam mempertahankan ciri khas pendidikan ma'arif.¹⁵

Pada tahun 2009, NU Sumatera Utara mengklaim bahwa terdapat sekitar 400 unit sekolah yang memiliki manajemen NU yang tersebar di seluruh Kabupaten di Sumatera Utara.¹⁶ Sedangkan yang berada di Medan salah satunya adalah YPNU di Jl. H. Manaf Lubis/Gaperta. Kondisi SMA Ma'arif di Jl. H. Manaf Lubis/Gaperta cukup memprihatinkan, meskipun lembaga pendidikan ini mempunyai area yang cukup luas dan letak strategis, akan tetapi pengelolaannya, seperti terlihat pada kondisi gedung sekolah dan halaman, tidak cukup baik untuk meningkatkan pendidikan Islam di Sumatera Utara.

Sekolah ini pada awalnya bernama Perguruan al-Ma'arif NU Medan yang didirikan pada tahun 1967 berdasarkan SK sekolah di Jl. Meranti dan berubah menjadi Yayasan Perguruan NU (YPNU) pada

¹⁴Ashari Tambunan, ketua PWNU Sumatera Utara 2007-2012, wawancara pada 10 Januari 2010 di kediaman yang bersangkutan.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Muhammad Ihsan "YPNU Sumut Dikelola Manajemen Baru" berita dalam www.nuonline.org.id pada Sabtu, 20 Juni 2009 diakses pada 2 Februari 2011.

tahun 1975. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Islam yang masih sangat terbatas jumlahnya pada saat itu. Untuk itu, beberapa tokoh seperti Ain Tanjung, Ishak Yahya, Saji Hrp, Musa Hrp, Yahya Muhammaddin (menjadi ketua pengelola) dan Idham berinisiatif dan mendirikan lembaga pendidikan al-Ma'arif NU Medan di Jl. Meranti.¹⁷

Awalnya lembaga pendidikan yang dirubah menjadi Perguruan al-Ma'arif NU Medan merupakan sekolah Cina yang diambil alih oleh tokoh-tokoh perjuangan angkatan 66 dan diserahkan kepada NU Medan untuk dikelola dan dikembangkan.

Pada masa awal pendiriannya, lembaga pendidikan ini mengelola pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA, PGA dan SPG. Pelaksanaan pengajaran dilakukan pada pagi dan sore hari. Guru yang ikut mengajar di lembaga tersebut antara lain Dohom Lubis, Rosyidah Tnjg, Saniar Lbs, Masturiah Silitonga, Syariat Nst dan Hilaluddin Nst.¹⁸

Dalam perkembangannya, Perguruan al-Ma'arif NU Medan mengalami perkembangan yang bagus. Hal ini terlihat dari jumlah kelas yang diasuh mencapai 24 kelas. Sejak pemerintah memberlakukan Ujian Akhir Nasional, lembaga ini berhasil meluluskan seluruh siswa peserta UAN.

Sejak tahun 1975, YPNU di Jl. Meranti dijual dan dipindahkan ke Jl. Manaf Lubis (Gaperta). Pengelolaan sekolah tersebut berada di bawah yayasan yang diketuai oleh Hasan Basri Batubara. Sayangnya, pada tahun 1990, YPNU mengalami kemunduran hebat diakibatkan

¹⁷ Mastar Ain Tanjung, salah satu tokoh pendiri Perguruan al-Ma'arif NU Medan, wawancara pada 7 April di tempat kediaman yang bersangkutan di Jl. Mustar No. 46E Medan.

¹⁸ Mastar Ain Tanjung, salah satu tokoh pendiri Perguruan al-Ma'arif NU Medan, wawancara pada 7 April di tempat kediaman yang bersangkutan di Jl. Mustar No. 46E Medan.

oleh konflik internal di tubuh Yayasan.¹⁹ Awal konflik bermula dari tindakan beberapa anggota yayasan yang menjadikan YPNU sebagai alat kepentingan pribadi dalam mencari kekuasaan politik. Hingga sekarang, belum penulis dapatkan informasi lengkap tentang konflik tersebut, karena selain terdapat beberapa versi, yang bersangkutan dalam konflikpun tidak mau memberikan informasi yang lengkap.²⁰

Pada tahun 2011, YPNU diketuai oleh Misran Sihalo, yang juga merupakan Kepala SMPN 1 Labuhan Deli. YPNU mengasuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dikepalai oleh Dra. Marlis, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikepalai oleh H. Hertin, SPd, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Drs. Rasmat Hasibuan, Sekolah Menengah Atas (SMA) dikepalai oleh Ir. Mukhlis, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Informatika (TI) dikepalai oleh Drs. Umar Dani dan SMEA Bisnis Manajemen dikepalai oleh Drs. Marisi Panjaitan. Meskipun seluruh jenjang pendidikan yang dikelola saat ini masih berstatus diakui oleh pemerintah, sangat besar peluangnya untuk ditingkatkan menjadi status yang disamakan dengan sekolah lainnya khususnya tingkat negeri.²¹

Pada tahun 2011, jumlah guru yang mengajar di YPNU adalah 90 orang dengan perincian 8 di SD, 17 di SMP, 17 di MTs, 18 di SMA, 13 di SMK dan 17 di STM. Sedangkan total siswa berjumlah 508 orang dengan perincian, 107 siswa SD, 167 siswa SMP, 69 siswa MTs, 54 siswa SMA, 34 SMK dan 77 siswa STM.²²

¹⁹ Mastar Ain Tanjung, salah satu tokoh pendiri Perguruan al-Ma'arif NU Medan, wawancara pada 7 April di tempat kediaman yang bersangkutan di Jl. Mustar No. 46E Medan.

²⁰ Hasan Basri Batubara adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam konflik internal tersebut. Menurut penuturan beliau, beberapa tokoh NU menggadaikan sekolah YPNU kepada pengusaha Cina untuk mendapatkan uang. Bpk. Drs. H. Hasan Basri Batu Bara, ketua YPNU tahun 1975, wawancara pada 21 November 2010 di rumah yang bersangkutan di Jl. Gaperta Medan .

²¹ Muhammad Ihsan "YPNU Sumut Dikelola Manajemen Baru" berita dalam www.nuonline.org.id pada Sabtu, 20 Juni 2009 diakses pada 2 Februari 2011.

²² Lembar *Data Guru dan Pegawai SMP dan SMA Swasta Nahdlatul Ulama*.

Mata pelajaran yang diajarkan di YPNU adalah Pendidikan Agama Islam, Matematika, KTK, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, Biologi, Fisika, TIK, Bahasa Inggris, TU, Sejarah, Akuntansi, Kimia, Geografi, Sosiologi, Pendidikan Jasmani, SKI, Akidah Akhlak, Alquran Hadis, Fikih dan Bahasa Arab. Di pelajaran tersebut, juga diajarkan mata pelajaran ke-Nuan untuk semua jenjang pendidikan.

Salah satu kebijakan pengelola untuk menarik minat masyarakat dalam menghadapi Tahun ajaran baru adalah tidak memungut uang pendaftaran bagi calon siswa yang ingin mendaftar di YPNU, diberikan secara gratis satu stel pakaian olahraga, atribut dasi dan topi bagi 80 pendaftar pertama setiap jenjang pendidikan.²³

Sedikitnya jumlah lembaga pendidikan NU di Medan menunjukkan bahwa perhatian NU di bidang pendidikan belum maksimal. Bahkan menurut penulis, klaim NU yang memiliki atau mengelola atau berkoordinasi dengan 400 unit sekolah di wilayah Sumatera Utara harus dipertanyakan. Hal ini dikarenakan NU menganggap bahwa selain lembaga pendidikan negeri, lembaga pendidikan yang dimiliki organisasi atau yayasan tertentu, adalah lembaga pendidikan Ma'arif bila ia mengikuti dan mengajarkan ajaran Islam berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah. Hal ini sama dengan klaim NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki anggota atau pengikut paling banyak di Sumatera Utara, di mana yang dianggap sebagai anggota atau pengikut NU adalah semua orang yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang tidak secara tegas menyatakan dirinya tergabung dalam organisasi sosial keagamaan tertentu seperti Muhammadiyah atau al-Washliyah, meskipun orang tersebut tidak menyatakan atau tidak menganggap dirinya sebagai anggota NU. Sepertinya, NU menganggap bahwa termasuk dalam anggota NU adalah seluruh warga negara yang berfaham Ahlussunnah wal

²³ Misran Sihalohe, Ketua YPNU Tahun 2011, wawancara pada Jum'at, 8 April 2011 di sekolah YPNU Jl. H. Manaf Lubis.

Jama'ah yang dicirikan oleh beberapa hal seperti praktik wirid, peringatan kematian dan sebagainya.

Apapun maksud dari istilah “sekolah yang memiliki manajemen NU”, paling tidak ia menunjukkan adanya keterlibatan NU di dalamnya. Karena itu, menurut penulis, keberadaan 400 lembaga pendidikan Ma'arif tersebut adalah semu mengingat lembaga pendidikan Ma'arif seperti yang ditetapkan dalam Munas tahun 2002 paling tidak harus menggunakan kata Nahdlatul Ulama di belakang bila menggunakan nama lain di depannya. Seperti dalam bab X tentang Identitas Kelembagaan yang menyebutkan bahwa:²⁴

1. Semua institusi kependidikan yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, wajib menggunakan dan mencantumkan nama Ma'arif Nahdlatul Ulama.
2. Semua institusi kependidikan yang diselenggarakan oleh lembaga, lajnah atau badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama atau lembaga kepengurusan lain, diperbolehkan menggunakan nama identitas masing-masing dengan menambahkan Nahdlatul Ulama.

Meskipun demikian, segala gagasan dan aktivitas NU di Sumatera Utara harus diapresiasi dan didukung untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu lembaga pendidikan Ma'arif NU Sumatera Utara, seperti di sebutkan sebelumnya, adalah Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama di Jl. H. Abdul Manaf Lubis No. 2 Medan. Pengelolaan lembaga pendidikan ini dilakukan oleh PWNU Sumatera Utara dengan manajemen baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa yang dihasilkan.

Program NU terkait lembaga pendidikan ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan hasil pendidikan, pembenahan manajemen sesuai dengan manajemen professional sehingga dapat mengikuti dan mencapai standar pendidikan nasional yang berlaku.

²⁴LPMNU, *Pedoman Umum*, h. 4.

Harapan masyarakat dan pemerintah kepada NU cukup besar dalam pengembangan pendidikan. Pada tahun 2010, Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin menyatakan harapan pemerintah terhadap NU untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Utara.²⁵ Dengan keberadaan masyarakat Sumatera Utara yang mayoritas muslim, peluang berkembangnya lembaga pendidikan tinggi NU sangat besar karena akan diminati dan menarik perhatian.

Sepertinya NU sendiri telah merancang pendirian lembaga pendidikan tinggi NU di Medan. Ketua PWNU Sumatera Utara, Ashari Tambunan mengatakan bahwa NU berkeinginan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta sebagai salah satu bentuk pengabdian dan partisipasi NU dalam pembangunan masyarakat.²⁶ Saat ini, rencana NU mendirikan lembaga pendidikan tinggi masih pada tahap inventarisasi potensi NU dalam bidang pengelolaan. Peluang realisasi rencana tersebut cukup besar mengingat NU telah mempersiapkan lahan untuk PTS NU.

C. Aktivitas Sosial NU di Medan

Tujuan dasar NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemasalahan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Kemaslahatan dan kesejahteraan umat merupakan tujuan sosial NU. Untuk mencapainya, NU mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan mendampingi masyarakat yang terpinggirkan.

²⁵Galih, "NU Diharapkan Buat PTS di Sumut" berita dalam *www.koran internet.co.id* edisi Rabu, 06 Januari 10 diakses pada 2 Pebruari 2010.

²⁶Ashari Tambunan, ketua PWNU Sumatera Utara 2007-2012, wawancara pada 10 Januari 2010 di kediaman yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan usaha tersebut, NU menetapkan paling tidak lima lembaga yang secara khusus melaksanakan kebijakan NU di bidang sosial yakni:²⁷

1. Lembaga Kemashlahatan Keluarga NU (LKK NU)

LKK NU adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan sosial-keagamaan keluarga warga NU. Tugas pokok LKK NU adalah:

- a. Pengkajian sosial keagamaan.
- b. Pengembangan wawasan keluarga sejahtera.
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Advokasi kependudukan dan lingkungan hidup.

2. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)

LAKPESDAM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Tugas pokok LAKPESDAM berkenaan dengan:

- a. Pengkajian sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
- b. Pengembangan kreativitas dan produktivitas masyarakat.
- c. Pendidikan dan pembinaan perencanaan strategis.
- d. Pengembangan program pembangunan sektoral.

3. Lembaga Bantuan Hukum NU (LBHNU)

LBHNU adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan program NU di bidang hukum. Program pokok LBHNU adalah:

- a. Mengkaji hukum dan perundang-undangan.
- b. Pendidikan kepengacaraan.
- c. Advokasi dan penyuluhan hukum.
- d. Kampanye penegakan hukum dan HAM.

4. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI)

²⁷PWNU Sumatera Utara, *Hasil-Hasil Musyawarah Kerja Nahdlatul Ulama Sumatera Utara 2007* (Medan: PWNU Sumatera Utara, Medan, 2007), h. 8, lihat juga Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara, *Nahdlatul Ulama: Uraian Singkat Tentang Sejarah, Kiprah dan Perangkat Organisasi* (Medan: PWNU Sumatera Utara, 2004), h. 3-9.

LESBUMI adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang seni dan kebudayaan.

5. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)

LKNU adalah lembaga NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesehatan.

Akan tetapi karena kurang maksimalnya kepengurusan NU Sumatera Utara, hingga saat ini hanya 2 dari lembaga tersebut yang telah dibentuk dan berperan secara aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan yakni LKKNU dan LAKPESDAM. Sedangkan tiga lembaga lainnya yakni LBHNU, LKNU dan LESBUMI masih akan memasuki tahap pembentukan dan pelantikan pengurus.²⁸ Akan tetapi meskipun demikian, program kerja pokok yang menjadi tugas dari tiga lembaga yang belum terbentuk telah diambil alih oleh kedua lembaga lainnya maupun badan otonom.

Sebagai organisasi sosial-keagamaan, salah satu perhatian pokok NU Sumatera Utara adalah aspek sosial masyarakat. Selain kedua lembaga tersebut di atas, lima badan otonom NU yang paling tua yakni Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU dan GP Ansor secara aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial NU. Lebih lanjut, IPNU dan GP Ansor jauh lebih aktif dibandingkan badan otonom NU yang dikhususkan untuk perempuan.

Aktivitas sosial NU sangat beragam mulai dari menggagas, menggerak atau melakukan secara langsung aktivitas sosial-kemasyarakatan. Secara garis besar, bentuk aktivitas sosial NU dapat dikelompokkan kepada penyuluhan, pemberian bantuan, hukum dan peningkatan rasa solidaritas sosial.

1. Penyuluhan

²⁸Gunawan Abdi, ketua IPNU Sumatera Utara, wawancara pada 3 Februari 2011 di Asrama PPS IAIN SU Sutomo.

Dalam bentuk penyuluhan, pada 10-17 November 1999, Lakpesdam Wilayah Sumatera Utara bekerja sama dengan Lakpesdam pusat mengadakan Diklat Manajemen Krisis Sumbagut di Medan. Pada Desember tahun 2008, NU melalui badan otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera utara melaksanakan sosialisasi program Anti Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) di Aula PHI Jalan Gatot Subroto Medan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sekitar 1000 pelajar telah diberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Penyuluhan Anti Narkoba dilakukan oleh IPNU Sumut sebagai bentuk kepedulian dan ikut bertanggungjawab atas keselamatan pelajar khususnya para santri yang rentan dengan Narkoba.²⁹

Pada tanggal 8 Januari 2011, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara bekerjasama dengan Kemitraan (Partnership), menggelar sosialisasi Gerakan Kejujuran di kalangan tokoh-tokoh NU di Perguruan NU, Jalan Pukat I/Mandailing Medan.³⁰ Gerakan ini didasarkan pada gagasan bahwa warga NU sebagai pengawal terdepan moral bangsa wajib mendukung gerakan kejujuran yang diharapkan mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis multidimensi. Lebih dari itu, kepedulian NU terhadap krisis multimedimensi diperkokoh oleh fakta bahwa masyarakat yang paling merasakan dampak krisis multidimensi itu adalah rakyat di lapisan akar rumput yang sebagian besar di antaranya warga NU.

²⁹Nasir Ahmad Mun'im, "IPNU Sumut Selesaikan Penyuluhan Bahaya Narkoba kepada 1.000 Pelajar" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Senin, 22 Desember 2008 diakses pada 2 Pebruari 2011.

³⁰Muktar Ahmad D., "Lakpesdam NU Sumut Sosialisasikan Gerakan Kejujuran" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Jumat, 7 Januari 2011 diakses pada 2 Pebruari 2011.

Sebelumnya, Lakpesdam juga menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) Dai dan Daiyah Antikorupsi di Kota Medan, selain di Padang Sidempuan dan Pandan Tapanuli Tengah.³¹

2. Hukum

Dalam bidang hukum, pada tahun 2004, NU Sumatera Utara melalui Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara mendukung langkah Kakanwil Departemen Agama Sumut, Prof. Mohd. Hatta yang meminta Inspektorat Jenderal (Irjend) Depag RI mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana operasional haji Embarkasi Polonia Medan tahun 2004. Bentuk dukungan tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat Nomor WB/1-B/PS.00/584/2004 tanggal 2 April 2004 kepada Irjend Depag RI di Jakarta yang meminta agar dilakukan pengusutan dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana operasional haji Embarkasi Medan tahun 2004.³²

Bentuk aktivitas lainnya adalah penolakan terhadap praktik undian judi bergaya baru. Pada November 2010, NU Sumatera Utara melalui GP Ansor mensosialisasikan gerakan penolakan undian berhadiah yang diadakan oleh PT Narada Bhakti Nusantara ini dinilai sebagai judi bentuk gaya baru. Penolakan NU terhadap praktik ini didasarkan pada anggapan bahwa undian lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya bagi masyarakat Sumatera Utara.

Aktivitas lainnya adalah desakan NU melalui GP Ansor kepada pemerintah untuk menasolisasikan PT Inalum Asahan Aluminium pada tahun 2010. Alasan desakan tersebut adalah keberadaan PT Inalum yang dianggap lebih banyak mudharat

³¹ *Ibid.*

³² Kontributor, "Ansor Sumut Dukung Pengusutan Penyelewengan Dana Operasional Haji" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 14 April 2004 diakses pada 2 Februari 2011.

ketimbang manfaatnya. Karena hingga saat ini Indonesia khususnya Sumatera Utara tidak pernah merasakan manfaat dari keberadaan PT Inalum. Desakan tersebut direalisasikan dalam bentuk surat yang diberikan kepada kepada Gubsu.³³

3. Pemberian Bantuan

Dalam bentuk bantuan bagi korban bencana alam, pada tahun 2010, PWNU Sumatera Utara bekerja sama dengan PBNU dan PCNU Tanah Karo melalui LPBINU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) membuka posko kemanusiaan dan melakukan kajian kebutuhan, memberikan bantuan berupa barang fisik dan psikososial melalui istighotsah dan doa bersama untuk membantu para pengungsi. Bentuk bantuan materil NU bagi korban Gunung Sinabung adalah beras 1 ton, air bersih 10.000 lt, sabun mandi 1000 btg dan lotion anti nyamuk 3000 sachet yang diberikan kepada 1000 kepala keluarga.³⁴

4. Peningkatan Solidaritas Sosial

Selain aktivitas tersebut, PWNU juga memperkuat rasa solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial pada masyarakat dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Pada tahun 2007, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara (Sumut) menyembelih 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Seluruh daging hewan kurban yang disembelih dibagikan kepada warga miskin di sekitar kota Medan.

Penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, rasa kepedulian kepada kaum miskin, memperat silaturahmi keluarga besar NU dan sesama masyarakat Medan. Hampir setiap tahun, pada hari

³³SRD., "Ansor Sumut Tuntut Nasionalisasi PT Inalum" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Kamis, 15 Juli 2010 diakses pada 2 Pebruari 2011.

³⁴Mukhtar Ahmad D, "NU Beri Bantuan untuk Pengungsi Gunung Sinabung" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 1 September 2010 diakses pada 2 Pebruari 2011.

raya Idhul Adha, NU selalu menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikan dagingnya bagi masyarakat.

Kegiatan lainnya adalah rangkaian Sahur Bareng Anak Jalanan dan Kaum Duafa yang dilaksanakan oleh GP Ansor Sumatera Utara pada Agustus 2010 di kawasan Pulo Brayan, kawasan Masjid Raya Medan, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Jalan Sisingamangaraja, Jalan Juanda dan kawasan Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto. Kegiatan ini tergolong baru di lingkungan NU Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, NU membagikan sekitar 1.000 bungkus makanan. Kegiatan ini dilaksanakan karena NU berasal dari ummat sehingga merasa terpanggil untuk berbagi sesama umat khususnya anak jalanan dan kaum duafa dan juga sebagai kelanjutan dari kebiasaan tokoh NU KH Abdurrahman Wahid yang semasa hidupnya yang sering melakukan kegiatan sahur bersama bersama anak jalanan dan kaum duafa.

D. Aktivitas Politik NU di Medan

Sebelum tahun 1952, NU secara aktif terlibat dalam kegiatan partai politik Masyumi. Sejak berdirinya Masyumi pada tahun 1945, NU bersama organisasi keagamaan lainnya menjadi anggota istimewa partai. NU melalui partai Masyumi berhasil menduduki beberapa kursi di parlemen dan kementerian khususnya kementerian agama.³⁵

Dalam perkembangannya, terjadi pergesekan ideologi yang serius di tubuh Masyumi antara NU dengan kelompok intelektual. Beberapa kejadian politik seperti Perjanjian Linggarjati 1948 dan Perjanjian Renville menyebabkan memuncaknya perselisihan di tubuh Masyumi. Kekecewaan NU terhadap elit politik Masyumi tidak mendapatkan tanggapan serius dari Masyumi, bahkan kelompok

³⁵Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), h. 251.

intelektual Masyumi menyindir NU yang seharusnya berada di surau, langgar atau mesjid untuk mengajarkan pengajian bukan berada di arena politik. Para pemimpin tertinggi di Masyumi sendiri dengan sengaja ingin menyingkirkan NU dari Masyumi dengan cara mengurangi peran strategis dewan permusyawaratan yang dipegang oleh NU. Pada tahun 1949, dalam Mukhtamar Masyumi IV, elit politik Masyumi berhasil menurunkan posisi Majelis Syura menjadi penasehat. Dengan demikian, NU di tubuh Masyumi tidak bisa berperan aktif dan tidak mempunyai pengaruh bagi kebijakan Masyumi.³⁶

Salah satu puncak inti perselisihan NU dengan Masyumi adalah ketika NU menyatakan sikap tegas untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1950. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan, NU tetap bertahan di Masyumi. Pada bulan Februari 1952, KH. Wahab Hasballah menghadap presiden Soekarno. Pertemuan ini dianggap Masyumi sebagai usaha mencari dukungan bagi NU untuk menjadi partai politik.³⁷

Pada 20 Maret 1952, NU kembali menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung wakil Masyumi dalam kabinet, memperjuangkan keinginan NU berkaitan dengan formasi kabinet dan mendesak Masyumi untuk mempertahankan kementrian agama. Penegasan ini merupakan ultimatum bagi Masyumi untuk merubah sikap politiknya yang tidak disetujui oleh NU. Karena Masyumi tetap tidak memperdulikan pernyataan-pernyataan NU, NU memutuskan keluar dari Masyumi pada April 1952.

Perbedaan paling mendasar antara NU dan Masyumi terletak pada gagasan bentuk negara dan strategi politik. Tujuan dasar politik NU adalah untuk menegakkan dan membentuk masyarakat Islamiyah, menganut faham perdamaian, menginginkan terciptanya negara

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

hukum yang berkedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU berubah menjadi partai politik pada tahun 1952.

Perubahan NU menjadi partai politik tentu berdampak besar bagi NU di Medan. Sebagai partai politik, NU di Medan menghadapi beberapa tantangan yakni kurangnya kader-kader NU yang cakap dalam berpolitik sekaligus seorang muslim yang taat kepada ulama. Untuk itu, usaha perekrutan anggota yang mahir dalam politik menjadi program NU pada masa awal transisinya. Dalam merekrut kader politik, NU tidak melihat latar belakang sosial dan pendidikan, syarat utama yang dipegang hanya mau taat kepada ulama yakni dewan Syuriah NU.

Perekrutan-perekrutan politis yang dilakukan NU telah merubah struktur kepengurusan NU di Medan, di mana NU tidak lagi diurus oleh tokoh-tokoh yang berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah akan tetapi juga tokoh-tokoh politik yang mau patuh terhadap dewan Syuriah.

Pergesekan antara partai Masyumi dengan partai NU di Medan kembali terjadi. Akan tetapi meskipun demikian, partai NU tetap menjalin hubungan koalisi dengan Masyumi.³⁸ Dapat dipastikan bahwa menjelang pemilu tahun 1955, hubungan antara partai NU di Medan dengan Masyumi memanas menyangkut persoalan komposisi kabinet atau perlemen.

Setelah Muktamar NU ke-20 di Surabaya, partai NU di Medan bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan memantapkan tujuan untuk menghadapi Pemilu pertama bagi partai NU. Baik kader-kader politik maupun ulama NU di Medan sama-sama terlibat dalam mengadakan propaganda demi kemenangan pemilu 1955. Pada 8 Juli 1955, Syeikh Musthafa Husein mengeluarkan seruan yang diterbitkan di media massa dan disebarakan secara massal di kalangan NU pada 24

³⁸*Ibid.*

September 1955 agar memilih tanda NU dalam Pemilu. Salah satu calon NU untuk konstituante adalah Syeikh H. Abdul Djabbar.³⁹

Hasil Pemilu tahun 1955 menunjukkan kekuatan NU sangat besar. Di Medan partai NU masuk dalam empat partai peraih suara terbanyak. Pemilih partai NU di Medan terdiri dari masyarakat Mandailing, Melayu, Sipirok dan masyarakat Muslim lainnya. Pengaruh NU di Medan menjangkau seluruh pemukiman-pemukiman etnik Mandailing, Melayu dan Sipirok di Medan. Kuatnya pengaruh NU pada masa-masa awal terbukti dari banyak suara yang didapatkan oleh partai NU dalam Pemilu 1955.⁴⁰

Dalam kurun waktu 1955-1968, gerakan politik NU di Medan bersinggungan dengan beberapa gerakan pemberontakan seperti Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon dan juga kemunculan PKI di berbagai wilayah di Indonesia. Isu-isu politik berpusat pada praktik demokrasi terpimpin dan konsep Nasakom gagasan Soekarno. Dalam kurun waktu tersebut, gerakan-gerakan politik partai NU tidak menghasilkan pengaruh yang cukup besar bagi perubahan politik.

Ketika beberapa tokoh NU pusat menerima jabatan kabinet dari penunjukan Soekarno, muncul kekecewaan pada pengurus NU di Medan terhadap PBNU. NU di tingkat nasional juga terancam pecah akibat keputusan beberapa tokoh NU yang lebih mengutamakan orientasi kekuasaan ketimbang kemaslahatan. NU di Medan menghadapi dilema antara dua pilihan yakni menerima gagasan-gagasan Soekarno yang berarti NU harus menyalahi tujuan politiknya atau menentang gagasan tersebut yang berarti menjadi lawan politik Soekarno dan terancam dibubarkan seperti partai Murba yang dibubarkan pada 1964.⁴¹

³⁹ Nasution, *Sekedar*.

⁴⁰ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, terj, Hadikusumo (Jakarta: LP3S Indonesia, 1994), h. 72.

⁴¹ Anam, *Pertumbuhan*, h. 265.

Perbincangan tentang PKI di Medan memang tidak sehangat di pulau Jawa. Akan tetapi dapat dipastikan, PKI tetap menjadi isu politik paling utama di Medan. Partai NU di Medan atas intruksi PBNU menggalang kekuatan politik dengan organisasi dan partai lainnya untuk melawan gerakan-gerakan PKI.

Setelah pecahnya gerakan Gerakan 30 September PKI, NU di Medan berperan aktif di tingkat nasional dalam mendesak pembubaran partai PKI dan menetapkannya serta seluruh media massa yang membantu gerakan PKI sebagai partai dan organisasi terlarang. Adalah Nuddin Lubis dan Djamaluddin Malik yang merupakan tokoh terkemuka NU di Medan yang menggagas gerakan pengadilan hukum bagi Soekarno atas keterlibatannya dalam partai PKI.

Setelah NU memainkan perannya yang sangat penting dalam menghadapi gerakan-gerakan PKI, setelah PKI dibubarkan, peluang NU untuk menjadi partai politik terbesar sangat terbuka. Terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak seperti partai politik lain, pemerintah dan bahkan ABRI bahwa NU akan menguasai peracaturan politik. Karena itu, NU diterpa isu pembentukan negara Islam. Kebijakan pemerintah menetapkan monoloyalitas pegawai negeri dan ABRI untuk partai Golkar di satu sisi merupakan usaha melawan partai NU di samping penguatan basis kekuatan politik Soeharto. Peraturan Permen Dalam Negeri No. 12/1969 juga merupakan salah satu usaha untuk menghalangi partai NU menjadi pemenang politik di tanah air.

Dalam Pemilu 1971, partai NU tetap merupakan salah satu partai politik Islam terbesar di Indonesia. Partai NU meraih 69% suara dari keseluruhan suara yang didapatkan oleh partai politik Islam. Pemilih NU pada 1971 kebanyakan berada di Jawa, karena itu di Medan, jumlah pemilih partai NU tidak sebanyak pada pemilu sebelumnya. Daya tarik politik NU dipengaruhi oleh kemampuan

Subhan yang gigih menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan partai selain Golkar.

Sayangnya, mencuatnya nama Subhan dalam politik di tanah air yang mengakibatkan perubahan positif bagi partai NU juga membawa pengaruh buruk bagi NU itu sendiri. Terjadi perpecahan di tubuh NU yang ditandai dengan perdebatan Idam Chalid dengan Subhan di media massa tentang sistim politik dan pemerintahan Orde Baru.⁴² Perdebatan tersebut memuncak pada pemecatan Subhan sebagai ketua PBNU oleh dewan Syuriah.

NU di Medan sendiri, dalam perpecahan ini, bersama dengan hampir seluruh cabang NU di Sumatera berpihak kepada Subhan dan tetap menganggapnya sebagai ketua PBNU yang sah.⁴³ Sayangnya, sebelum perpecahan tersebut menemui solusi terbaik, Subhan meninggal dunia di Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah haji.

Pada tahun 1973, usaha Soeharto untuk menguasai politik Indonesia semakin terlihat ketika ditetapkan pengelompokan partai politik kepada dua yakni partai materil-spritual dan partai spritual-materil. Dengan kebijakan tersebut, 9 partai politik di Indonesia dikurangi menjadi 2 partai yakni Golkar dan partai spritual materil yang merupakan gabungan dari partai NU, Pamusi, PSII dan Perti yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian, NU sebagai partai politik hilang dengan dideklarasikannya PPP pada Pebruari 1973.

Pada masa awal transisi NU dari partai politik menjadi organisasi sosial keagamaan, NU di Medan mengalami stagnasi, kebekuan, kelelahan dan tidak mempunyai arah yang jelas. Dengan

⁴² Subhan menganggap bahwa sistim pemerintahan Orde Baru sudah tidak dapat dibedakan dari Orde Lama. Karena itu, Subhan merasa NU seharusnya tidak mendukung pemerintahan tersebut apalagi masuk ke dalam kabinet seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh NU di tingkat nasional. Sementara itu, Idham Chalid, salah satu tokoh paling senior NU mendukung pemerintah dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Perdebatan tersebut terus memanas dan meluas hingga di kalangan PBNU tersebar photo Subhan yang sedang berdansa dengan seorang wanita meskipun photo tersebut diambil jauh sebelum Subhan masuk ke NU.

⁴³*Ibid*, h. 270.

dititipkannya aspirasi politik kepada PPP, kekuatan politik praktis NU dalam dunia politik Medan dianggap dan diyakini telah hilang. Sejak kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, NU di Medan tidak lagi terlibat dalam politik praktis.

Kebijakan NU yang tidak terlibat dalam politik praktis tidak berarti NU tidak mempunyai kekuatan politik. NU masih bergerak di bidang politik non-praktis meskipun tidak menggunakan visi, misi dan tujuan politik yang jelas. Dalam politik, NU tetap menarik dikarenakan mempunyai basis massa yang cukup besar.

Ada beberapa bentuk praktik politik non-praktis yang dilakukan oleh NU di Medan. Seluruh aktivitas tersebut merupakan usaha untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera dengan cara mengawal proses politik yang sehat di Sumatera Utara. umumnya bentuk keterlibatan politik NU di Medan hanya berupa silaturahmi dengan tokoh-tokoh politik. Melalui silaturahmi tersebut, NU mempunyai prestise tersendiri hingga dapat menanamkan pengaruh pada dunia politik sewaktu-waktu.

Pada Oktober 2010 silam, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Prof. DR. H. Achmad Mubarrok MA dan beberapa anggota DPRD Sumatera Utara bersilaturahmi dengan NU di Medan.⁴⁴ Meskipun demikian, tentu saja baik NU dan tamunya mengaku bahwa kunjungan tersebut adalah kunjungan silaturahmi biasa. Akan tetapi, silaturahmi ini merupakan wadah politik bagi keduanya di mana partai politik mengharapkan dukungan massa NU, sementara NU mengharapkan prestise di mata partai untuk dapat memberikan pengaruh politik ketika diperlukan.

Silaturahmi tokoh politik lainnya dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008, DR. H Maratua Simanjuntak. Maratua menyatakan dengan jelas keinginannya agar NU sebaga

⁴⁴Nasir Ahmad Mun'im, "Mubarrok Bersilaturahmi dengan Warga NU Sumut" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 27 Oktober 2010 diakses pada 2 Februari 2011.

sebagai wadah ulama di Sumatera Utara hendaknya mendukung ulama untuk jadi pemimpin di Sumatera Utara. Permintaan tersebut secara tidak langsung merupakan permintaan dukungan untuk dirinya, mengingat Ashari Tambunan, ketua NU Sumatera Utara menganggapnya sebagai seorang ulama. Akan tetapi meskipun demikian, Ashari Tambunan menyatakan NU sebagai ormas keagamaan tidak mau terlibat dalam politik praktis dan tidak akan mendukung calon manapun dalam Pilgubsu. Dalam hal ini NU berusaha bersikap netral, tidak berpihak kepada satu calon tertentu.⁴⁵

Pada November 2010, ketua DPR RI dan tokoh politik dari partai Demokrat mengikuti serangkaian acara NU di Medan, di antaranya meresmikan kantor PWNU Sumut, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Pengurus Cabang NU Kabupaten Deli Serdang, meninjau Yayasan Pendidikan NU Sumut di Jalan Gaperta Medan, mengikuti pertemuan dan silaturahmi akbar jajaran kader NU Sumut. Setiap silaturahmi NU dengan tokoh politik selalu disertai dengan penegasan bahwa silaturahmi tersebut tidak berhubungan dengan urusan politik.⁴⁶

Baik Demokrat, Golkar, PKB dan PPP berusaha untuk mendapatkan suara warga NU di di Medan. Tentu saja usaha tersebut dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dalam silaturahmi meskipun dibantah NU mempunyai tujuan politik.

Akan tetapi, meskipun jarang, NU di Medan pernah terlibat lebih jauh dalam politik. Meskipun tidak didasarkan pada informasi politik yang memadai, sikap politik NU sangat jelas dinyatakan. Dalam suatu kasus pada tahun 2007, GP Ansor memberikan dukungan pada walikota Medan, Abdillah menunjukkan adanya peran politik yang sangat kuat pada diri NU. Dalam ungkapan langsung ketua GP Ansor

⁴⁵Muhammad Syafi'i Sitorus, "Jadi Cagubsu, Maratua Silaturahmi Ke PWNU Sumut" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 30 Januari 2008 Diakses pada 3 Pebruari 2011.

⁴⁶Kontributor, "Ketua DPR Ikuti Sejumlah Kegiatan Nu Sumut" berita dalam www.indonesia.go.id. Diakses pada 3 Pebruari 2011.

Medan Yusrizal SH menyatakan “Kita siap menghadapi siapa saja yang hendak mengganggu Abdillah dalam mengemban tugas-tugasnya sebagai walikota, termasuk jika gangguan itu datangnya dari Wakil Walikota Medan sekalipun”. GP Ansor juga meminta agar wakil walikota, Ramli Lubis agar tahu diri sekaligus menempatkan dirinya pada posisi serta porsi yang semestinya sebagai seorang Wakil Walikota.⁴⁷

Menurut penulis, sikap GP Ansor yang demikian merupakan sikap yang berlebihan dalam politik, dukungan terhadap walikota dan penolakan terhadap wakilnya. Sejak NU keluar dari partai politik, otomatis segala akses terhadap informasi praktik politik praktis di Sumatera Utara berkurang. Dukungan kepada walikota Medan yang tidak disertai dengan informasi politik yang jelas terbukti dengan divonisnya Abdillah sebagai terpidana korupsi.

Bentuk lain aktivitas politik non-praktis NU di Medan adalah kontrol terhadap dinamika politik di Sumatera Utara. Dalam berbagai kesempatan NU mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan bagi pelaku politik khususnya dalam Pemilu untuk berlaku jujur demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Pada hari raya Idul Adha tahun 2007, NU mengingatkan agar tokoh politik di Sumatera Utara tidak menjadikan kurban sebagai wadah politik untuk mendapatkan simpati rakyat.⁴⁸

Baik kritik NU terhadap PPP yang menggunakan jasa artis seronok hingga tidak mencerminkan partai politik Islam di Medan⁴⁹ atau unjuk rasa GP Ansor di Konjen Amerika Serikat di Medan terkait

⁴⁷Antrdh, “GP Ansor akan Kawal Abdillah Bangun Kota Medan” berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 7 November 2007 Diakses pada 3 Pebruari 2011.

⁴⁸Ant dan Shr, “Jangan Kotori Idul Adha dengan Misi Politik” berita dalam www.nuonline.org.id edisi Rabu, 19 Desember 2007, Diakses pada 3 Pebruari 2011.

⁴⁹Ant “Calonkan Artis Seronok, PPP Bukan Warisan Ulama” berita dalam www.nuonline.org.id edisi Senin, 8 September 2008, diakses pada 3 Pebruari 2011.

intervensi politik di Mesir⁵⁰ juga merupakan bentuk aktivitas kontrol politik NU di Medan.

NU di Medan sangat tegas menyatakan sikapnya dalam bidang politik yakni tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak memberikan dukungan bagi partai manapun. Lebih dari itu, Ashari Tambunan dengan tegas menyatakan bahwa meskipun terdapat permintaan kepada dirinya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada pemilihan mendatang, ia dengan teguh memegang prinsip NU dan menolak untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

Konsistensi NU di Medan untuk tidak terlibat dalam urusan politik memuncak pada kasus tuduhan penjualan nama NU kepada tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto pada tahun 2009 oleh 6 oknum pengurus PWNU. Secara tegas, berbagai elemen dalam NU meminta agar keenam oknum tersebut dipecat dari kepengurusan NU di Medan.⁵¹

⁵⁰Srd, "Ansor Sumut: AS Jangan Intervensi Mesir" berita dalam www.nuonline.org.id edisi Senin, 7 Februari 2011, diakses pada 3 Pebruari 2011.

⁵¹Kontributor, "Banom Minta Enam Oknum Pengurus NU Sumut Dipecat" berita dalam www.medansatuonline.co.id diakses pada 2 Pebruari 2011.